

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 3



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

## Ketua DPRD Sebut Belum Dapatlan Surat resmi Pembentukan Pansus JIS

**JAKARTA (Poskota)** - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menegaskan bahwa pemebentukan panitia khusus (Pansus) untuk mendalami polemik persoalan Jakarta International Stadium (JIS) harus melalui surat resmi dan tidak bisa hanya omongan mulut semata.

Hal tersebut disampaikan lantaran Prasetyo mengaku belum mendapatkan surat resmi dari anggotanya yang ingin menggulirkan pembentukan Pansus.

Untuk itu, pihaknya masih menunggu apabila ada anggotanya yang mengajukan usulan Pansus untuk dalami pembangunan JIS. "Silakan mana suratnya. Sampai sekarang saya di depan teman-teman media saya belum terima surat usulan itu," ujar Prasetyo di Jakarta, dikutip, Kamis (13/7).

Selanjutnya, dikatakan Pras, setelah

diajukan surat tersebut lalu pihaknya akan menanyakan urgensi pembentukan pansus untuk menelusuri pembangunan JIS. Maka ia pun mengaku heran mendengar ada anak buahnya usul membentuk Pansus JIS.

"Sekarang perlu dilihat unsur urgentnya untuk membentuk pansus karena syarat pembentukan pansus harus ada unsur kondisi darurat," tuturnya.

Politikus PDI Perjuangan ini pun menjelaskan, sejumlah aturan pembentukan pansus dalam Peraturan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo mengu-

sulkan untuk membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menelisik pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) era Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Sebab proyek yang menghabiskan banyak uang rakyat, tapi fasilitas penunjangnya masih belum standar internasional.

"Iya harus (bentuk Pansus), jika dipandang perlu apalagi ini sudah menggunakan banyam uang rakyat kab sekitar 4,4 triliun dari PEN dan APBD DKI," ujar Dwi Rio, Senin (10/7).  
**(Aldi/Ifn)**